

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat di Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian karena sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terbatas pada kekayaan alam hayati. Indonesia memiliki berbagai sektor seiring dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Pada sektor pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam kekayaan alam yang dapat di ekspor sehingga dalam sektor pertanian ini memiliki peran dalam memacu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional juga ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah. Potensi yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap tingkat pembangunan nasional maupun daerah. Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam sektor pertanian dengan didukung kekayaan alam yang melimpah (<http://www.academia.edu>).

Lahan yang subur juga merupakan modal yang sangat potensial untuk menjadikan pertanian Indonesia sebagai sumber penghasilan masyarakatnya dan mendorong perekonomian bangsa. Namun dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih kurang memperhatikan sektor pertanian sehingga sektor pertanian belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Secara geografis Indonesia memiliki jumlah populasi penduduk dengan jumlah besar yaitu 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016, dengan luas daratan

1,904,569 km², dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki luas lahan sawah tahun 2014 sebesar 8,114,829 Ha.

Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, sektor pertanian menjadi sektor utama bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran sektor pertanian dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian bahwa untuk kegiatan Optimasi Lahan terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 549,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan volume luasnya 927.704 Ha. Namun, pemerintah masih kurang memperhatikan sektor pertanian dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan atau program pembangunan pertanian yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan sektor pertanian menjadi tertinggal. Lahan-lahan pertanian yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sebagian besar telah dialihkan menjadi pemukiman industri, jalan tol, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mengakibatkan sempitnya lahan untuk sektor pertanian. Meskipun sektor pertanian kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sektor ini masih menjadi dominan dalam mata pencaharian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Putro (2011), di era otonomi daerah ini Pemerintah memiliki keleluasaan dalam kebijakan pembangunan pertanian. Salah satu tujuan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri yakni mengembangkan sarana prasarana, permodalan untuk mendukung hasil sektor pertanian sehingga memiliki

keunggulan di bidang pertanian dan dapat menunjang perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pelaksanaan peran tersebut Pemerintah membangun kerja sama dan meningkatkan kualitas sistem pertanian yang ada bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Soebagiyo (2013), berlakunya otonomi daerah memberikan dorongan terhadap peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan dapat bertambah baik. Pengelolaan pada keuangan daerah merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Menurut Pelealu (2013), dalam era otonomi diharapkan timbul adanya kemandirian desa yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah menyediakan belanja desa yang dapat mencukupi untuk kebutuhan berbagai sektor-sektor. Pemerintah desa sendiri diharapkan dapat lebih berperan dalam

meningkatkan pendapatan di desa dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan nasional.

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki desa baik berupa barang atau jasa. Menurut Siburian,dkk (2014), hak dan kewajiban dapat menimbulkan yaitu pendapatan, belanja dan keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan salah satu hal penting untuk menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tingkat desa. APBDesa memiliki prinsip partisipasi, transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas yang baik karena hal tersebut akan memberikan dampak yang baik pula terhadap nilai pemerintah desa yang dijalankan.

Kemandirian desa dalam pengelolaan anggaran untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa itu sendiri yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan desa dalam meningkatkan keuangan desa yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam membangun pengelolaan dan pembangunan desa. Peningkatan PADes menjadi hal yang harus diperhatikan. Apabila PADes mengalami peningkatan maka penerimaan untuk belanja desa, pembiayaan pengelolaan desa dan pembangunan desa dapat meningkat. Sehingga kemandirian desa dalam meningkatkan kualitas publik dan kualitas kebutuhan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pembangunan desa dapat terwujud.

Menurut Siburian ,dkk (2014), penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan di desa membutuhkan dukungan berupa dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya sesuai dengan tujuan yang dicapai. Rendahnya tingkat kemampuan keuangan yang dimiliki desa dan pemerintah desa, maka ditetapkan bahwa desa berhak memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota berupa dana desa. Tanpa adanya dana desa, pemerintahan tidak bisa menjalankan program-program sesuai dengan tujuan dan prioritas kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih terhadap pengelolaan wilayahnya. Menurut Romantis (2015), salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap periode anggaran yang diberikan kepada desa-desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan. Dengan adanya pemberian alokasi dana desa ini diharapkan bantuan atau dana untuk membiayai dan mewujudkan program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik.

Dalam meningkatkan keuangan desa di era otonomi desa, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan mengenai perpajakan daerah. Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten. Dalam penerimaannya difokuskan dengan sistem bagi hasil dimana bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil pajak retribusi tersebut sehingga menguntungkan wilayah tertentu.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam hal perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan wilayahnya. Khususnya kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Wonogiri yaitu berupa lahan sawah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dalam menghasilkan pendapatan, jumlah sawah yang dimiliki membutuhkan permodalan dalam pengembangan agar dapat mencapai hasil atau pendapatan yang sesuai, maka diiperlukannya pengeluaran dari rekening desa dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Desa wajib berperan secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam berkembangnya program pertanian di setiap desa melalui APBDes.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan perlu diatur berdasarkan Undang-Undang. Pada penelitian ini Peneliti ingin meneliti pada sektor Desa, khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mana penelitian ini masih jarang dilakukan dan penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar hanya mengupas tentang Daerah atau APBD. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang APBDesa karena ingin

mengetahui mengenai keuangan desa, seberapa besar pendapatan desa yang diperoleh terhadap belanja desa bidang pertanian dan pemanfaatan potensi pertanian di Kabupaten Wonogiri. Belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti di desa-desa Kabupaten Wonogiri.

Penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo) ini telah dilakukan sebelumnya tahun 2017. Penelitian sebelumnya mencantumkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk studi empiris di desa se-Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel yaitu jumlah sawah sebagai variabel independennya dan untuk studi empiris adalah di desa-desa Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian?
4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian?
5. Apakah Jumlah Sawah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.
3. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.

4. Untuk menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.
5. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemikiran teori-teori terhadap ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik terutama dalam bidang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan mengenai belanja desa serta dapat menerapkan berbagai kajian teori yang telah ada dan dibandingkan dengan kehidupan nyata.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mahasiswa tentang Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Wonogiri).

c. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dan desa berkaitan dengan anggaran dan pendapatan belanja desa yang diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Wonogiri . Baik Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, jumlah sawah disajikan secara transparan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam menambah informasi dan bahan teori ilmu pengetahuan terutama pada belanja desa.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terhadap pengembangan desa dimasa depan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang telaah teori untuk membahas permasalahan penelitian yang akan diteliti yang meliputi teori desentralisasi desa, teori kemandirian desa, teori keuangan desa, teori tentang pembangunan

desa, teori pendapatan asli desa, teori tentang dana desa, teori alokasi dana desa, teori bagian hasil pajak dan retribusi, teori tentang jumlah sawah, teori alokasi belanja desa bidang pertanian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi sampel penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN